

Analisis Perkembangan UMKM dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Faza Salbillah Kusnadi¹, Aulia Umami Supia², Marini³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Islam

*Penulis Korespondensi: fazasalsabillah09@gmail.com , ummi71834@gmail.com ,
marini@umb.ac.id

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have the potential to support regional economic growth through job creation, income generation, and the use of local resources. This study analyzes the development of MSMEs and examines their implications for economic growth in Bengkulu Province. The study uses secondary data with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from Statistics Indonesia (BPS) publications, government reports, and relevant scientific articles published between 2021 and 2026. The analysis covers regional economic development, the structure of business fields, the potential links between MSMEs and production and trade activities, and the challenges of business development. BPS data show that the economy of Bengkulu Province grew by 4.26% in 2023 and 4.62% in 2024. This indicates stronger regional economic activity, but it does not prove that MSME growth was its direct cause. The literature review shows that the effect of MSMEs is easier to observe in business production and employment than in regional gross domestic product, and that financial literacy, bookkeeping, and the gradual adoption of digital technology are related to business performance. Local evidence is still limited to Bengkulu City and small samples. Strengthening MSMEs therefore requires financing accompanied by mentoring, better financial literacy, phased digitalization, and consistent business data.

Keywords: Bengkulu; economic growth; MSMEs; regional economy; secondary data

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan UMKM dan mengkaji implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah, dan artikel ilmiah yang terbit pada 2021-2026. Analisis mencakup perkembangan ekonomi daerah,

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

struktur lapangan usaha, potensi keterkaitan UMKM dengan kegiatan produksi dan perdagangan, serta tantangan pengembangan usaha. Data BPS menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh 4,26% pada 2023 dan 4,62% pada 2024. Angka tersebut menggambarkan penguatan aktivitas ekonomi daerah, tetapi belum membuktikan bahwa pertumbuhan UMKM menjadi penyebab langsungnya. Telaah literatur menunjukkan bahwa pengaruh UMKM lebih mudah terlihat pada produksi usaha dan penyerapan tenaga kerja daripada pada PDRB, serta bahwa literasi keuangan, pencatatan usaha, dan digitalisasi bertahap berkaitan dengan kinerja usaha. Bukti lokal masih terbatas pada Kota Bengkulu dengan sampel kecil. Penguatan UMKM karena itu memerlukan pembiayaan yang disertai pendampingan, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi bertahap, dan data usaha yang konsisten.

Kata kunci: Bengkulu; data sekunder; ekonomi daerah; pertumbuhan ekonomi; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian karena berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, menyediakan kesempatan kerja, serta mendukung pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berdasarkan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar di lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memperkuat perekonomian daerah.

Di Provinsi Bengkulu, aktivitas ekonomi masyarakat berkaitan dengan sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta berbagai kegiatan jasa. Struktur ekonomi tersebut menyediakan peluang bagi perkembangan UMKM, baik melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perdagangan produk lokal, maupun penyediaan makanan, minuman, dan jasa. Keterkaitan antara kegiatan usaha berskala kecil dengan sektor-sektor ekonomi tersebut dapat membentuk rantai kegiatan ekonomi yang melibatkan produsen, pedagang, pekerja, dan konsumen.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, perekonomian daerah pada 2023 tumbuh sebesar 4,26%, sedangkan pada 2024 pertumbuhannya mencapai 4,62%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2024 tercatat sebesar Rp103,99 triliun (BPS Provinsi Bengkulu, 2024; 2025). Peningkatan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Bengkulu mengalami penguatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan UMKM, tetapi juga oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, serta perkembangan berbagai lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan atau produktivitas secara merata. Karena itu, peran UMKM perlu dikaji dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh.

Ketersediaan data UMKM yang konsisten dari tahun ke tahun juga menjadi hal penting. BPS Provinsi Bengkulu pada 2023 menyampaikan pelaksanaan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM sebagai upaya mendukung pembentukan basis data yang dapat digunakan untuk pemetaan pelaku usaha, tenaga kerja, permodalan, pasar, pendapatan, dan pemanfaatan digitalisasi (BPS Provinsi

Bengkulu, 2023). Data yang memadai diperlukan agar perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah dapat dianalisis secara lebih akurat.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu searah dan signifikan. Hia et al. (2021) menemukan bahwa pembiayaan Ultra Mikro berpengaruh signifikan terhadap produksi industri mikro dan kecil di tingkat provinsi, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Bengkulu, Selviyanti et al. (2026) melaporkan bahwa jumlah UMKM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja tersebut. Temuan yang beragam ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan UMKM dalam konteks struktur ekonomi dan kualitas usaha di setiap daerah, tidak hanya melihat jumlah unit usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan perekonomian Provinsi Bengkulu dalam kaitannya dengan potensi dan peran UMKM, serta mengidentifikasi implikasi pengembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pengembangan UMKM serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya diukur melalui perubahan PDRB atas dasar harga konstan, yang mencerminkan perubahan volume produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. UMKM berkontribusi pada besaran tersebut melalui nilai tambah yang dihasilkan unit usaha, tetapi kontribusinya bercampur dengan kegiatan usaha berskala besar sehingga tidak dapat dibaca langsung dari angka pertumbuhan agregat. Karena itu, kajian tentang UMKM umumnya menggunakan indikator tambahan seperti jumlah unit usaha, tenaga kerja, omzet, nilai tambah, dan nilai ekspor.

Secara konseptual, terdapat tiga jalur yang menghubungkan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertama, jalur ketenagakerjaan: UMKM bersifat padat karya dan dilaporkan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Selviyanti et al., 2026; Utami & Abdullah, 2024), sehingga perluasan usaha dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan konsumsi. Kedua, jalur nilai tambah: pengolahan komoditas lokal dan peningkatan mutu produk dapat menaikkan nilai produksi per unit usaha. Ketiga, jalur pasar dan keterhubungan wilayah: usaha yang tersebar menghubungkan wilayah produksi dengan wilayah konsumsi. Trisnawan dan Yuliarmi (2022) menunjukkan bahwa jumlah UMKM dapat berperan sebagai variabel perantara antara infrastruktur dan investasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kondisi pendukung usaha ikut menentukan hasil akhirnya.

2.2 Bukti Empiris tentang Dampak UMKM

Dari sisi pembiayaan, Hia et al. (2021) menggunakan data panel 33 provinsi tahun 2017-2018 dan menemukan bahwa pembiayaan Ultra Mikro berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan kinerja pada tingkat unit usaha tidak otomatis tercermin pada indikator makro, terutama pada periode pengamatan yang pendek.

Di Kota Bengkulu, Selviyanti et al. (2026) menggunakan data tahunan 2015-2025 dan menemukan bahwa jumlah UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Penulisnya menafsirkan hasil tersebut sebagai gejala *jobless growth*, yaitu pertumbuhan yang tidak diikuti penyerapan

tenaga kerja secara proporsional. Studi ini menjadi rujukan lokal yang penting, tetapi cakupannya terbatas pada satu kota dan 11 titik pengamatan sehingga hasilnya perlu dibaca sebagai petunjuk, bukan kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke seluruh provinsi.

2.3 Literasi Keuangan, Pengelolaan Usaha, dan Digitalisasi

Kinerja UMKM sebagai prasyarat kontribusi terhadap ekonomi daerah banyak dikaji dari sisi kapasitas pengelolaan usaha. Utami dan Abdullah (2024) meneliti 100 UMKM di Kota Bengkulu dan menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha, sedangkan sikap keuangan dan perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan. Nilai adjusted R^2 sebesar 0,087 dalam studi tersebut menunjukkan bahwa faktor lain di luar model memiliki peran besar. Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) pada 113 UMKM di Kota Surabaya memperoleh temuan yang sejalan: literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha, sedangkan inklusi keuangan tidak. Fachruzzaman et al. (2021) mengkaji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di Bengkulu, yang menunjukkan bahwa pencatatan dan informasi keuangan telah menjadi perhatian dalam kajian UMKM di daerah ini.

Digitalisasi merupakan faktor lain yang banyak dikaji. Ramdansyah dan Ganika (2024) menganalisis UMKM di Provinsi Banten periode 2019-2023 dengan data panel. Mereka menemukan bahwa intensitas penggunaan teknologi digital dasar berhubungan positif dengan nilai tambah UMKM, dan penjualan daring berhubungan positif dengan nilai tambah serta jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, adopsi berbagai teknologi sekaligus berhubungan negatif dalam jangka pendek karena biaya penerapan yang tinggi. Usai et al. (2021) memberi catatan kehati-hatian dengan melaporkan bahwa adopsi teknologi digital tidak otomatis meningkatkan kinerja inovasi perusahaan. Dengan demikian, manfaat digitalisasi bergantung pada kesiapan pengguna dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi yang telah tersedia dari berbagai sumber, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi lapangan, maupun penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang digunakan berkaitan dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Sumber data meliputi publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, laporan resmi pemerintah, publikasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data yang dikaji mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi UMKM, serta faktor-faktor yang berpotensi mendukung perkembangan usaha dan perekonomian daerah. Literatur diprioritaskan pada terbitan lima tahun terakhir, dengan tetap memperhatikan relevansi dan ketersediaan sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah dokumen serta publikasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema perkembangan UMKM, kondisi perekonomian daerah, peluang pengembangan usaha, dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Selanjutnya, informasi dibandingkan antarperiode apabila tersedia dan diinterpretasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak melakukan pengujian statistik kausal, pembahasan mengenai implikasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui analisis keterkaitan ekonomi, bukan sebagai bukti langsung hubungan sebab-akibat.

Pemilihan literatur ilmiah dilakukan dengan kriteria berikut: (a) diterbitkan pada 2021-2026; (b) dimuat dalam jurnal ilmiah dengan identitas penerbitan yang jelas; (c) membahas UMKM, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, pembiayaan, literasi keuangan, atau digitalisasi usaha; dan (d) dapat ditelusuri melalui DOI atau halaman resmi penerbit. Studi yang berlokasi di Bengkulu diprioritaskan, kemudian studi dari daerah lain di Indonesia dan studi internasional digunakan sebagai pembanding. Setiap temuan dicatat sesuai konteks wilayah, periode, dan metode yang digunakan penulis aslinya dan tidak digeneralisasi melampaui cakupan data tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Perekonomian Provinsi Bengkulu

Perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu dapat ditinjau melalui perubahan laju pertumbuhan dan nilai PDRB. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai 4,26%, kemudian meningkat menjadi 4,62% pada 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada 2024 mencapai Rp103,99 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai sekitar Rp54,45 triliun (BPS Provinsi Bengkulu, 2024; 2025).

Peningkatan pertumbuhan dari 4,26% menjadi 4,62% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu menguat pada 2024. Namun, perubahan tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan perkembangan UMKM karena PDRB mencakup kegiatan ekonomi dari berbagai skala usaha dan lapangan usaha. Untuk mengukur kontribusi UMKM secara lebih terperinci, diperlukan data jumlah dan skala usaha, nilai produksi atau omzet, tenaga kerja, serta nilai tambah yang dihasilkan pelaku UMKM.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan bagian penting dalam struktur ekonomi Provinsi Bengkulu. Perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta berbagai kegiatan jasa juga menyediakan peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengolahan hasil pertanian, perdagangan komoditas lokal, distribusi barang, dan penyediaan jasa pendukung kegiatan ekonomi (BPS Provinsi Bengkulu, 2025).

4.2 Perkembangan dan Potensi UMKM di Provinsi Bengkulu

UMKM di Provinsi Bengkulu memiliki peluang pengembangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang serta jasa. Usaha pengolahan makanan, perdagangan hasil pertanian, kerajinan, kuliner, dan berbagai jasa merupakan contoh bidang usaha yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik pasar setempat.

Pendataan UMKM berperan penting untuk memahami kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. BPS Provinsi Bengkulu pada 2023 menjelaskan bahwa Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM diarahkan untuk menghasilkan informasi mengenai pelaku dan unit usaha, tenaga kerja, pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran, permodalan, serta pemanfaatan digitalisasi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar perencanaan program pemberdayaan UMKM (BPS Provinsi Bengkulu, 2023).

Jumlah unit usaha saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan UMKM. Penilaian juga perlu memperhatikan perkembangan omzet, produktivitas tenaga kerja, keberlanjutan usaha, kemampuan mengakses pembiayaan, dan perluasan pasar. Karena seri data jumlah UMKM yang terverifikasi serta konsisten antarperiode perlu dihimpun secara terpisah, penelitian ini tidak menyimpulkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah UMKM Bengkulu secara kuantitatif.

Data tingkat kota memberi gambaran awal. Selviyanti et al. (2026), yang merujuk pada data BPS Kota Bengkulu dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, menyajikan jumlah UMKM Kota Bengkulu yang naik dari 29.182 unit pada 2015 menjadi 44.773 unit pada 2025, sementara penyerapan tenaga kerja naik dari 157.576 menjadi 190.378 orang. Namun, kenaikan tersebut terkonsentrasi pada 2015-2019, ketika jumlah unit bertambah dari 29.182 menjadi 44.696. Sejak

2019 jumlahnya hampir tidak berubah, yakni 44.696 unit pada 2019 dan 44.773 unit pada 2025 menurut tabel yang sama.

Pola yang hampir datar tersebut memiliki dua kemungkinan penjelasan yang perlu dibedakan. Pertama, ekspansi jumlah unit usaha memang melambat setelah 2019; perekonomian Kota Bengkulu berkontraksi 0,25% pada 2020, yang oleh penulis studi tersebut dikaitkan dengan pandemi Covid-19. Kedua, angka tersebut dapat mencerminkan cara pencatatan dan pembaruan basis data, bukan dinamika usaha yang sebenarnya. Penelitian ini tidak dapat memastikan penjelasan mana yang lebih tepat, tetapi kedua kemungkinan itu menegaskan pentingnya pendataan yang konsisten, seperti yang diupayakan melalui Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (BPS Provinsi Bengkulu, 2023).

4.3 Implikasi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Secara konseptual, perkembangan UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Ketika kegiatan usaha berkembang dan membutuhkan tambahan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga dapat meningkat. Pendapatan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membeli barang atau jasa lain sehingga mendorong aktivitas ekonomi setempat.

UMKM juga dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal. Komoditas pertanian atau perkebunan yang semula dipasarkan dalam bentuk bahan mentah berpeluang diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat menciptakan kesempatan usaha baru dalam produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Bagi Provinsi Bengkulu, pengembangan usaha yang terhubung dengan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan peluang yang layak dikaji lebih lanjut.

Selain itu, UMKM dapat memperluas distribusi kegiatan ekonomi. Keberadaan usaha di berbagai kabupaten dan kota memungkinkan perputaran uang berlangsung tidak hanya di pusat perdagangan, tetapi juga di wilayah yang memiliki potensi sumber daya lokal. Jika didukung jaringan pemasok dan pasar yang baik, perkembangan UMKM dapat memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi.

Digitalisasi juga dapat membuka peluang perluasan pasar. Pemanfaatan media sosial, lokapasar, dan pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas. Manfaat tersebut bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi, menjaga kualitas produk, mengelola biaya pemasaran, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Mekanisme tersebut menjelaskan potensi peran UMKM, tetapi belum menjadi bukti bahwa UMKM telah memberikan kontribusi tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Pembuktian empiris membutuhkan data UMKM yang terukur dan dapat dibandingkan dengan indikator ekonomi daerah dalam periode yang sama.

4.4 Sintesis Bukti Empiris tentang UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1 merangkum studi yang ditelaah pada bagian sebelumnya. Ringkasan ini disusun berdasarkan hasil yang dilaporkan penulis masing-masing. Lokasi, periode, dan indikator yang digunakan berbeda-beda, sehingga perbandingan antarstudi bersifat indikatif.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Studi Terdahulu

Peneliti (tahun)	Lokasi dan data	Temuan utama
Hia et al. (2021)	33 provinsi di Indonesia, 2017-2018 (data panel)	Pembiayaan Ultra Mikro signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peneliti (tahun)	Lokasi dan data	Temuan utama
Trisnawan & Yuliarmi (2022)	Wilayah yang dilalui Tol Batang-Semarang (analisis jalur)	Infrastruktur dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah UMKM; jumlah UMKM memediasi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selviyanti et al. (2026)	Kota Bengkulu, 2015-2025 (11 pengamatan)	Jumlah UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.
Utami & Abdullah (2024)	100 UMKM di Kota Bengkulu	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM; sikap dan perilaku keuangan tidak signifikan.
Hilmawati & Kusumaningtias (2021)	113 UMKM di Kota Surabaya	Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha; inklusi keuangan tidak.
Ramdansyah & Ganika (2024)	UMKM di Provinsi Banten, 2019-2023 (data panel)	Intensitas digital dan penjualan daring berhubungan positif dengan nilai tambah UMKM; adopsi banyak teknologi berhubungan negatif dalam jangka pendek.

Sumber: diolah dari studi yang tercantum pada kolom pertama (lihat Daftar Pustaka).

Tiga pola dapat dibaca dari tabel tersebut. Pertama, pengaruh UMKM lebih mudah ditunjukkan pada indikator yang dekat dengan unit usaha, seperti produksi (Hia et al., 2021) dan penyerapan tenaga kerja (Selviyanti et al., 2026), daripada pada PDRB. Kedua, kondisi pendukung seperti infrastruktur dan investasi turut menentukan jumlah UMKM (Trisnawan & Yuliarmi, 2022). Ketiga, faktor kualitas usaha seperti literasi keuangan dan digitalisasi berkaitan dengan kinerja usaha, tetapi besarnya pengaruh bervariasi dan tidak semua variabel yang diuji terbukti signifikan.

4.5 Penyerapan Tenaga Kerja: Temuan dari Kota Bengkulu

Studi Selviyanti et al. (2026) memberikan bukti lokal yang paling dekat dengan topik kajian ini. Dengan regresi linear berganda atas data tahunan 2015-2025, mereka melaporkan koefisien jumlah UMKM sebesar 2,064 terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti setiap tambahan satu unit UMKM berasosiasi dengan tambahan sekitar dua orang tenaga kerja yang terserap. Koefisien determinasi sebesar 0,804 menunjukkan bahwa kedua variabel dalam model, yaitu jumlah UMKM dan pertumbuhan ekonomi, menjelaskan sebagian besar variasi penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut.

Hasil tersebut perlu dibaca bersama keterbatasannya. Model hanya memakai 11 pengamatan, dan uji autokorelasi Durbin-Watson yang dilaporkan penulisnya berada pada daerah yang tidak dapat disimpulkan. Selain itu, jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja sama-sama menunjukkan tren naik dalam periode pengamatan, sehingga hubungan statistik yang kuat dapat sebagian mencerminkan tren bersama, bukan hanya pengaruh langsung. Penulisnya sendiri mencatat bahwa pada 2025 jumlah UMKM bertambah tetapi penyerapan tenaga kerja turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sejalan dengan kehati-hatian kajian ini. Pertumbuhan PDRB dapat bersumber dari lapangan usaha yang tidak padat karya, sehingga angka pertumbuhan yang menguat belum tentu berarti kesempatan kerja bertambah. Bagi pembuat kebijakan, hal ini mengarahkan perhatian pada lapangan usaha yang memadukan pertumbuhan dengan penyerapan tenaga kerja, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil yang disebut oleh Selviyanti et al. (2026) sebagai sektor yang

layak didorong. Kajian ini belum dapat memastikan apakah pola yang sama berlaku di kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.

4.6 Literasi Keuangan, Pengelolaan Usaha, dan Akses Pembiayaan

Literasi keuangan menjadi faktor yang relevan bagi Bengkulu. Utami dan Abdullah (2024) mengutip hasil survei OJK 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Provinsi Bengkulu sebesar 30,39%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 49,68%. Angka ini perlu dibaca sebagai kutipan dari studi tersebut, dan data resmi OJK sebaiknya dirujuk langsung pada penelitian lanjutan. Apabila literasi keuangan pelaku usaha rendah, kemampuan menyusun anggaran, mencatat transaksi, dan menilai biaya pinjaman juga berpotensi terbatas, yang pada gilirannya membatasi kemampuan usaha memanfaatkan pembiayaan secara produktif.

Temuan Utami dan Abdullah (2024) memperkuat kekhawatiran tersebut. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM Kota Bengkulu, dan para penulisnya menyimpulkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya mampu melakukan pencatatan keuangan, menyusun anggaran, dan menyediakan dana cadangan. Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menemukan bahwa literasi keuangan, bukan inklusi keuangan, yang berkaitan dengan kinerja dan keberlangsungan usaha di Surabaya. Implikasinya, perluasan akses ke produk keuangan perlu disertai pelatihan pengelolaan keuangan agar akses tersebut menghasilkan peningkatan kinerja.

4.7 Digitalisasi dan Adopsi Teknologi

Digitalisasi sering dipandang sebagai jalan untuk memperluas pasar UMKM, tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa manfaatnya bersyarat. Ramdansyah dan Ganika (2024) melaporkan bahwa pada UMKM di Provinsi Banten, penggunaan teknologi digital dasar berkaitan dengan kenaikan nilai tambah, dan penjualan daring berkaitan dengan kenaikan nilai tambah serta jumlah tenaga kerja. Namun, model mereka hanya menjelaskan sebagian kecil variasi kinerja, dengan adjusted R^2 untuk nilai tambah UMKM sekitar 0,09, dan adopsi berbagai teknologi sekaligus berhubungan negatif dalam jangka pendek karena biaya penerapan.

Ramdansyah dan Ganika (2024) juga menunjukkan adanya kesenjangan digitalisasi antardaerah dan menyebut keterbatasan keterampilan, pendanaan, serta infrastruktur teknologi informasi di wilayah perdesaan sebagai hambatan. Karena Provinsi Bengkulu memiliki wilayah perkotaan dan perdesaan dengan karakter yang berbeda, hambatan serupa patut diperhitungkan, meskipun tingkat digitalisasi UMKM Bengkulu sendiri belum dapat dipastikan dari data yang tersedia dalam kajian ini. Usai et al. (2021) turut mengingatkan bahwa teknologi digital tidak otomatis meningkatkan kinerja inovasi perusahaan. Oleh sebab itu, program digitalisasi perlu dimulai dari kebutuhan dasar, seperti pencatatan transaksi, pembayaran nontunai, dan pemasaran daring, sebelum beralih ke teknologi yang lebih kompleks.

4.8 Tantangan Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM berpotensi menghadapi tantangan permodalan yang dapat menghambat pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan sarana usaha. Akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan usaha. Pelaku usaha memerlukan peningkatan kemampuan dalam pencatatan keuangan, perencanaan produksi, penentuan harga, pengemasan, dan strategi pemasaran. Pengelolaan yang lebih teratur dapat membantu pelaku usaha menilai biaya dan keuntungan sehingga keputusan usaha dilakukan berdasarkan informasi yang memadai.

Keterbatasan akses pasar dan pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi peluang UMKM untuk berkembang. Penggunaan platform digital perlu disertai kemampuan menghasilkan promosi yang sesuai, menjaga reputasi usaha, serta memastikan produk dikirimkan dengan aman dan tepat

waktu. Di samping itu, data usaha yang akurat dan berkelanjutan diperlukan agar program pemberdayaan dapat menysasar pelaku usaha sesuai kebutuhan.

4.9 Strategi Penguatan UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Penguatan UMKM di Provinsi Bengkulu perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah, bukan hanya penambahan jumlah unit usaha. Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas usaha dapat mengembangkan pendampingan yang mencakup pengelolaan keuangan, peningkatan mutu produk, pengemasan, sertifikasi yang relevan, dan pemasaran digital.

Pengembangan UMKM dapat diperkuat melalui hubungan antara pelaku usaha dan sektor ekonomi unggulan daerah. Kerja sama antara petani, pengolah hasil pertanian, pedagang, dan penyedia jasa distribusi dapat membentuk rantai pasok yang lebih efisien. Dari sisi pembiayaan, informasi mengenai pilihan pendanaan, pendampingan administrasi, dan peningkatan literasi keuangan dapat membantu pelaku UMKM mengelola kebutuhan modal dan kewajiban usaha.

Evaluasi kebijakan perlu menggunakan indikator yang jelas, seperti perubahan omzet, jumlah tenaga kerja, produktivitas, akses pasar, keberlanjutan usaha, dan pemanfaatan teknologi. Pengukuran secara berkala dapat membantu pemerintah menilai apakah program pemberdayaan menghasilkan perbaikan kinerja usaha dan mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan telaah di atas, strategi penguatan UMKM di Bengkulu dapat disusun dalam tiga lapis prioritas. Lapis pertama adalah penguatan kapasitas dasar pelaku usaha melalui pelatihan literasi keuangan, pencatatan sederhana, dan penentuan harga pokok, mengingat literasi keuangan berkaitan dengan kinerja UMKM di Kota Bengkulu (Utami & Abdullah, 2024). Lapis kedua adalah pembiayaan yang disertai pendampingan dan evaluasi kinerja usaha penerima (Hia et al., 2021). Lapis ketiga adalah digitalisasi bertahap yang mempertimbangkan kesiapan keterampilan dan infrastruktur (Ramdansyah & Ganika, 2024).

Kondisi pendukung usaha juga perlu diperhatikan. Trisnawan dan Yuliarmi (2022) menunjukkan bahwa infrastruktur dan investasi berpengaruh positif terhadap jumlah UMKM di wilayah yang diteliti, sehingga pembangunan konektivitas dan perbaikan iklim usaha dapat menjadi bagian dari agenda pengembangan UMKM, bukan program yang terpisah.

4.10 Indikator Pemantauan dan Implikasi Kebijakan

Agar kontribusi UMKM dapat dinilai lebih terukur, pemerintah daerah perlu memantau indikator kinerja usaha, yaitu omzet, nilai tambah, tenaga kerja, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital, tidak hanya jumlah unit usaha. Pemantauan tersebut memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, target program sebaiknya dirumuskan sebagai peningkatan kinerja usaha, misalnya kenaikan omzet atau penyerapan tenaga kerja, bukan hanya penambahan jumlah pelaku usaha yang terdaftar. Kedua, data harus dapat dibandingkan antarperiode dan antardaerah agar program dapat dievaluasi, sehingga pembaruan data perlu dilakukan dengan definisi dan metode yang konsisten. Ketiga, evaluasi program pembiayaan dan pelatihan perlu dilakukan pada tingkat penerima manfaat sebelum dikaitkan dengan pertumbuhan PDRB, karena hasil Hia et al. (2021) menunjukkan bahwa dampak pada produksi usaha tidak selalu terlihat pada indikator ekonomi daerah.

4.11 Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis bersumber dari data sekunder dan literatur sehingga tidak dapat menguji hubungan sebab-akibat antara UMKM dan pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Kedua, bukti lokal yang tersedia umumnya berskala Kota Bengkulu dan berbasis sampel atau periode terbatas, misalnya 11 pengamatan tahunan (Selviyanti et al., 2026) dan 100 responden (Utami & Abdullah, 2024). Penelitian lanjutan disarankan menyusun data omzet, tenaga kerja, dan nilai tambah UMKM untuk seluruh kabupaten/kota di Bengkulu, disertai survei primer tentang literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan penguatan pertumbuhan dari 4,26% pada 2023 menjadi 4,62% pada 2024. Struktur ekonomi daerah yang mencakup pertanian, perdagangan, transportasi, dan berbagai kegiatan jasa menyediakan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha yang berkaitan dengan pengolahan produk lokal, perdagangan, distribusi, dan penyediaan jasa.

UMKM berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, dan penguatan perputaran ekonomi masyarakat. Namun, data yang digunakan dalam kajian ini belum cukup untuk mengukur besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan data jumlah usaha, omzet, tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah UMKM yang konsisten antarperiode.

Telaah literatur lima tahun terakhir memperkuat kehati-hatian tersebut. Studi terdahulu menunjukkan bahwa dampak pembiayaan dan jumlah UMKM lebih mudah terlihat pada produksi usaha dan penyerapan tenaga kerja daripada pada PDRB, sementara literasi keuangan dan digitalisasi berkaitan dengan kinerja usaha. Bagi Bengkulu, hal ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas usaha dan perbaikan data lebih layak diprioritaskan daripada penambahan jumlah unit usaha semata.

Pengembangan UMKM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, perluasan akses pembiayaan dan pasar, penguatan kemampuan pengelolaan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital. Dukungan kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan potensi ekonomi lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan UMKM sekaligus meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2023). Himbauan Gubernur Bengkulu untuk Menyukkseskan PL-KUMKM 2023. <https://bengkulu.bps.go.id/id/news/2023/09/13/632/himbau-gubernur-bengkulu-untuk-menyukkseskan-pl-kumkm-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2024). Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Tumbuh 4,26 Persen (C-to-C). <https://bengkulu.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/890/bengkulu-province-economy-in-2023-experienced-growth-of-4-26-percent--c-to-c-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/197cd29f0b24bcc6d10715a3/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bengkulu-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Tumbuh Sebesar 4,62 Persen (C-to-C). <https://bengkulu.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/907/bengkulu-province-economy-in-2024-experienced-growth-of-4-62-percent--c-to-c-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2020-2024. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/043e3d5fbd7713f861c9a9f2/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bengkulu-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
- Fachruzzaman, F., Indriani, R., Mediastuty, P. P., Fitranita, V., & Zaman, A. A. P. (2021). The accounting information system impact on micro, small, medium-sized enterprises

- performances in Bengkulu. JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen, 18(2), 236-246. <https://doi.org/10.31106/jema.v18i2.12530>
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(1), 75-84. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor usaha mikro kecil menengah. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 10(1), 135-152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Ramdansyah, A. D., & Ganika, G. (2024). Pengaruh digitalisasi terhadap kinerja UMKM (Studi pada KUKM di Provinsi Banten). Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa, 8(2), 115-128. <https://doi.org/10.35448/jrbmt.v8i2.28797>
- Selviyanti, N., Asad, & Siswantoro, A. (2026). Pengaruh jumlah UMKM dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bengkulu. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5(2), 13798-13805. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9978>
- Trisnawan, Y. L., & Yuliarmi, N. N. (2022). Pengaruh infrastruktur, investasi, biaya transportasi terhadap jumlah UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilalui Tol Batang-Semarang. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 11(1), 55-77. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i01.p03>
- Usai, A., Fiano, F., Messeni Petruzzelli, A., Paoloni, P., Farina Briamonte, M., & Orlando, B. (2021). Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms' innovation performance. Journal of Business Research, 133, 327-336. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.035>
- Utami, A. A., & Abdullah. (2024). Pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, perilaku keuangan terhadap kinerja UMKM Kota Bengkulu. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7(3), 5365-5377. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8120>